

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu tantangan dalam pembangunan di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah di bidang kependudukan. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi masalah penduduk yang berjumlah relatif masih tinggi, sedangkan di lain pihak sumber daya alam terbatas. Keadaan penduduk tersebut disebabkan lebih tingginya tingkat kelahiran dibandingkan dengan tingkat kematian, disamping itu, penyebaran penduduk yang tidak seimbang juga menyebabkan pemanfaatan sumber-sumber alam yang tidak seimbang. Keadaan ini merupakan masalah dalam usaha pemerataan kesejahteraan penduduk.

Merencanakan dan mengatur keluarga adalah soal kemanusiaan yang sekarang ini sedang diusahakan pelaksanaannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Kalau pembangunan itu adalah pembangunan manusia, maka kelahiran manusia itu pun harus diatur. Pengaturan itu harus diadakan, agar supaya kenaikan produksi tidak dikalahkan oleh kenaikan kelahiran anak. Hal yang ditakutkan itu pun terjadi pada masa sekarang ini, dimana kelahiran anak mengalahkan kenaikan produksi terutama produksi pangan. Di samping itu pertumbuhan penduduk yang tidak disertai dengan pertumbuhan yang cukup dalam produksi nasional dapat juga menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kurangnya fasilitas pendidikan, kurangnya penyediaan

makanan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Usaha perencanaan keluarga harus dilakukan sedemikian rupa supaya tidak bertentangan dengan hukum yang berjalan dinegeri ini, juga tidak bertentangan dengan ajaran agama yang merupakan sumber rasa susila dan rasa peri kemanusiaan. Ini semua harus diatur oleh pemerintah dan harus didukung pula oleh segenap rakyat.

Gerakan keluarga berencana merupakan buah perjuangan tokoh-tokoh pelapor keluarga berencana baik dari dalam maupun luar negeri. Gerakan Keluarga Berencana diluar negeri di pelapori oleh Inggris dan Amerikat pada awal abad XIX dengan tokohnya Marie Stopes dan Margareth Sanger, sedangkan di Indonesia tokoh yang terkenal adalah Dr Suliani Suroso dari Yogyakarta.

Pemerintah telah memastikan program keluarga berencana adalah bagian integral dari pembangunan lima tahun tahap pertama. Oleh karena itu satu tahun kemudian pemerintah memutuskan bahwa sudah waktunya mengambil alih program Keluarga Berencana menjadi program pemerintah yang sepenuhnya.

Dengan alasan tersebut di atas program Keluarga Berencana di jadikan program nasional sedangkan untuk mengelolanya di bentuk Badan-Badan Koordnansi Keluarga Berencana Nasional dengan keppres no 8 tahun 1970, dengan dasar pertimbangan pemerintah pembentukan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Kepala BKKBN periode 2015-2020 Dr. Surya Chandra Surapaty.

Mulai awal tahun 2016 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Lembaga Non Kementerian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK) Secara nasional membuat terobosan baru yang bersifat kedaerahan dan bernuansa kearifan lokal yang disebut istilah” Kampung Keluarga Berencana”.

Karena mengimplementasikan kegiatan-kegiatan program KKBPK secara utuh di lini lapangan, maka Kampung Keluarga Berencana akan menjadi salah satu bentuk / modal miniature pelaksanaan total program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian / Lembaga, mitra kerja, stakeholder instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah serta di laksanakan di tingkatan terendah (sesuai prasarat penentuan lokasi Kampung Keluarga Berencana) di seluruh Kabupaten / Kota. Definisi Kampung Keluarga Berencana pada kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana yang di terbitkan oleh Direktor Teknologi Informasi dan Dokumentasi (Dittifdok) BKKBN pada tahun 2011.

Dalam operasionalnya, Kampung Keluarga Berencana dimaknai sebagai satuan wilayah setingkat RW, pedukuhan atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik. Kampung Keluarga Berencana ini direncanakan, di laksanakan dan di evaluasi oleh dan untuk masyarakat.

Secara umum, Kampung Keluarga Berencana ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil

berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung Keluarga Berencana ini di bentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan Kampung Keluarga Berencana nantinya akan meliputi kependudukan, Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga (pembangunan keluarga) serta kegiatan lintas sektor (bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak), di sesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung Keluarga Berencana, Sasaran kegiatan yang merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan kegiatan di Kampung Keluarga Berencana selain keluarga. Pencanaan Keluarga Berencana (KB) Tingkat Sumatera Barat (Sumbar) secara resmi di rencanakan di Koto Padang, Selasa (1/3) di Kelurahan Parupuk Tabing RW 17 Kecamatan Koto Tengah.

Di samping itu, Deputi Dalduk BKKBN sebagai utusan dari BKKBN Pusat mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemprov Sumbar, Pemko Padang, serta seluruh tokoh yang terlibat dalam mensukseskan perencanaan Kampung Keluarga Berencana RW 17 Parupuk Tabing ini.

Program nasional ini fokus untuk daerah terpencil seperti Pesisir, kampung nelayan, pedesaan dan daerah tertinggal. program Kampung Keluarga Berencana

ini akan semakin sukses, karena semenjak 2010, Program Keluarga Berencana di Sumbar terus meningkat dan masuk 10 besar untuk Provinsi yang sukses menerapkan program Keluarga Berencana, serta kita perlu memberi aplus bagi jajaran Pemko Padang.

Program Keluarga Berencana tidak lagi hanya mengurus, mencegah, mengatasi ataupun menyuruh setiap keluarga dengan cukup punya anak dua. Tetapi program Keluarga Berencana telah terpadu secara menyeluruh. Yaitu, memasuki ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan, meningkatkan pendapatan, pendidikan, kesehatan yang kesemuanya masuk dalam program Keluarga Berencana.

Suksesnya suatu program dalam hal ini program keluarga berencana, tergantung dari aktif atau tidak aktifnya partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut. Sehingga dalam posisi ini peran aktif masyarakat sangat penting artinya bagi kelancaran dan keberhasilan program tersebut dan tercapainya tujuan secara mantap. Program Keluarga Berencana dicanangkan dalam rangka usaha pemerintah untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk membuat perubahan dari suatu kondisi tertentu ke keadaan lain yang lebih bernilai. Agar proses perubahan itu dapat menjangkau sasaran-sasaran perubahan keadaan yang lebih baik dan dapat digunakan sebagai pengendali masa depan, di dalam melaksanakan pembangunan itu perlu sekali memperhatikan segi manusia. Karena dalam arti proses, pembangunan itu menyangkut makna bahwa manusia itu objek pembangunan dan sekaligus subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan

manusia harus diperhitungkan, sebab dia punya nilai dan potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, di dalam pembangunan perlu sekali mengajak subjek tadi untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan secara berkelanjutan.

Kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam program tertentu, peranan tokoh masyarakat baik formal maupun non-formal sangat penting terutama dalam mempengaruhi, memberi contoh, dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya guna mendukung keberhasilan program. Apalagi di masyarakat pedesaan, peran tersebut menjadi faktor determinan karena kedudukan para tokoh masyarakat masih sangat kuat pengaruhnya, bahkan sering menjadi tokoh panutan dalam segala kegiatan hidup sehari-hari warga masyarakat. Persepsi warga masyarakat terhadap program tertentu merupakan landasan atau dasar utama bagi timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat dan berperan aktif dalam setiap kegiatan program tersebut. Makna positif atau negatif sebagai hasil persepsi seseorang terhadap program akan menjadi pendorong atau penghambat baginya untuk berperan dalam kegiatannya. Berdasarkan sensus penduduk 2014, jumlah penduduk Indonesian sudah mencapai 252,2 juta jiwa atau bertambah 10,2 juta jiwa sejak tahun 2010 artinya setiap tahun selama periode 2010-2014 jumlah penduduk bertambah 2,8 juta jiwa.

Angka fertilitas dan mortalitas di Indonesia yang masih relatif tinggi semakin menambah masalah kependudukan yang ada. Jika dilihat dari sisi pembangunan ekonomi, maka kondisi ini tidak menguntungkan bagi pembangunan karena penduduk dianggap sebagai beban pembangunan. Pengaturan pembatasan akan jumlah anak dalam suatu keluarga, secara mikro

merupakan salah satu pertimbangan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Tingginya angka kelahiran di Indonesia oleh pasangan subur. Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kelahiran. Program Keluarga Berencana di Indonesia mulai dilaksanakan oleh PKBI pada tahun 1957, namun kemudian pada tahun 1970 an Pemerintah RI mengambil alih program Keluarga Berencana dan menjadikan program nasional. Pada tahun 1980 an, semua Provinsip di Indonesia telah melaksanakan program Kelurga Berencana nasional. Disamping itu, dilaksanakan tiga upaya pokok program Keluarga Berencana lainnya yakni :

1. Pendewasan usia perkawinan.
2. Pengaturan kelahiran dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
3. Peningkatan ketahanan keluarga.

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Padang beserta peserta Keluarga Berencana. Aktif serta PUS bukan peserta Keluarga Berencana hasil pendapatan keluarga tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kota Padang.

**Tabel 1.1**

Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB aktif, dan Bukan Peserta KB menurut  
alasanya per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS (ORANG)	JUMLAH PSERTA KB (ORANG)	HAMIL (ORANG)	PUS BUKAN PESERTA KB		
					IAS	IAT	TI AL
1	KOTO TANGAH	8.811	5.965	231	2.294	231	76
2	KURANJI	23.878	20.167	540	3.018	344	92
3	LUBUK BEGALUNG	14.625	16.385	625	1.674	267	44
4	LUBUK KILANGAN	8.928	5.625	181	452	25	65
5	NANGGALO	15.060	11.765	532	1.824	245	85
6	PADANG BARAT	18.863	17.051	281	2.446	173	228
	<b>PADANG</b>	90.165	76.958	2.390	11.708	1.285	590

Sumber : BKKBN

Keterangan :

IAS : Ingin Anak Segera

IAT : Ingin Anak di Tunda

TIAL : Tidak Ingin Anak Lagi

Tabel berikut memperlihatkan jumlah pasangan usia subur, peserta Keluarga Berencana aktif, dan bukan peserta Keluarga Berencana di kota Padang Tahun 2015. Dari jumlah PUS sebesar 90.165 orang, kecamatan Kuranji memiliki jumlah PUS tertinggi sebesar 23.878 orang, dengan pengguna Keluarga Berencana sebesar 20.167, dan yang terendah terdapat pada kecamatan Koto Tangah sebesar 8.811 orang, dengan peserta Keluarga Berencana 5.965 orang.

Melakukan penelitian tentang peran menjadi akseptor Keluarga Berencana dalam memediasi pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan demografi terhadap



jumlah anak pada pasangan usia subur di kampung Keluarga Berencana. Variabel pendapatan keluarga dan kerja istri pada penelitian ini termasuk faktor ekonomi. Variabel pendidikan termasuk faktor sosial serta umur pernikahan termasuk faktor demografi dan menjadi akseptor Keluarga Berencana istri termasuk variabel intervaning.

Dengan melalui proposal skripsi ini penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **Peran Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi Dan Demografi Terhadap Jumlah Anak Pada Pasangan Usia Subur Di Kampung Keluarga Berencana (studi kasus Parupuk Tabing).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh pendapatan keluarga terhadap jumlah anak pasangan usia subur di Kampung Keluarga Berencana.
- 2) Bagaimana pengaruh umur pernikahan terhadap jumlah anak pada pasangan usia subur di Kampung Keluarga Berencana.
- 3) Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan istri terhadap jumlah anak pada pasangan usia subur di Kampung Keluarga Berencana.
- 4) Bagaimana pengaruh jam kerja istri terhadap jumlah anak pada pasangan usia subur di Kampung Keluarga Berencana.
- 5) Bagaimana pengaruh menjadi akseptor KB terhadap jumlah anak pada pasangan usia subur di Kampung Keluarga Berencana.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh pendapat keluarga terhadap jumlah anak pasangan usia subur di Kampung Keluarga Berencana.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh umur pernikahan terhadap jumlah anak pasangan usia subur di Kampung Keluarga Berencana.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan istri terhadap jumlah anak pasangan usia subur di Kampung Keluarga Berencana.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh jam kerja istri terhadap jumlah anak pasangan usia subur di Kampung Keluarga Berencana.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh menjadi akseptor keluarga berencana terhadap jumlah anak pasangan usia subur di Kampung Keluarga Berencana.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk menerapkan konsep-konsep teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan serta meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan melalui berbagai temuan di lapangan yang sebelumnya belum terungkap khususnya tentang kependudukan dan pengendalian jumlah kelahiran. Selain itu, diharapkan juga dapat mendukung hasil penelitian sebelumnya yang sudah ada yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada pemerintah Kota Padang khususnya dalam upaya peningkatan kualitas program kependudukan dan Keluarga Berencana. Program yang dimaksud adalah pengendalian jumlah kelahiran dengan tetap mengedepankan hak dan kesehatan reproduksi keluarga.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

#### Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

#### Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori atau konsep-konsep yang relevan mengenai pengaruh faktor ekonomi, sosial dan demografi terhadap jumlah anak pada Pasangan Usia Subur sebagai acuan dan landasan permasalahan yang ada, serta rumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang ingin di pecahkan dalam tesis ini.

#### Bab III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang kerangka berpikir yang di susun berdasarkan studi teoritik kemudian di gambarkan dalam bentuk bagan, model matematika atau perumusan fungsional, yang dilengkapi dengan uraian kualitatif, serta menunjukan semua variabel yang akan di kaji pada penelitian ini yang di gunakan

sebagai dasar untuk menyusun hipotesis penelitian dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan.